

ISU LINGKUNGAN DALAM BINGKAI MEDIA
(Analisis Framing Pembangunan Pabrik Semen di Gunung Kendeng
Pada Harian Suara Merdeka Edisi Desember 2016 - April 2017)



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika

Oleh:

ANGELEKA GAGARIN BRAHMANTI PUTRI
L 100 130 084

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

ISU LINGKUNGAN DALAM BINGKAI MEDIA

**(Analisis Framing Pembangunan Pabrik Semen di Gunung Kendeng Pada Harian Suara
Merdeka Edisi Desember 2016 – April 2017)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

ANGELEKA GAGARIN BRAHMANTI PUTRI

L100130084

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Agus Triyono, M.Si.

NIK. 1105

HALAMAN PENGESAHAN

ISU LINGKUNGAN DALAM BINGKAI MEDIA

**(Analisis Framing Pembangunan Pabrik Semen di Gunung Kendeng Pada Harian Suara
Merdeka Edisi Desember 2016 – April 2017)**

OLEH

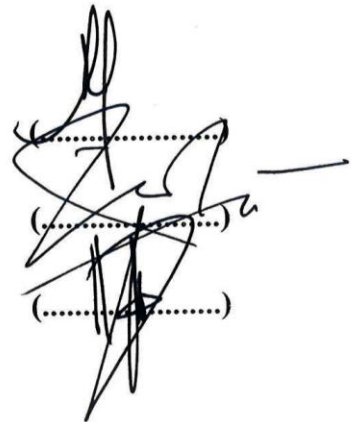
ANGELEKA GAGARIN BRAHMANTI PUTRI

L100130084

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 23 Januari 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

- 1. Agus Triyono, M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)**
- 2. Budi Santoso, M.Si.
(Anggota I Dewan Penguji)**
- 3. Sidiq Setyawan, M.I.Kom.
(Anggota II Dewan Penguji)**



Dekan,

Nurgiyatna, M.Sc., Ph.D.

NIK. 881

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 4 Februari 2019

Penulis



Angeleka Gagarin B P
L100130084

ISU LINGKUNGAN DALAM BINGKAI MEDIA
(Analisis Framing Pembangunan Pabrik Semen di Gunung Kendeng Pada
Harian Suara Merdeka Edisi Desember 2016 - April 2017)

Abstrak

Keterlibatan media dalam memberitakan suatu peristiwa tidak hanya melihat dari segi realitas saja. Sejatinya media mempunyai sebuah kepentingan tersendiri dimana ideologi, konsep politik dan konsep budaya berjalan di dalamnya. Penelitian ini berfokus pada pemberitaan mengenai pembangunan pabrik semen di Gunung Kendeng, Jawa Tengah pada *Harian Suara Merdeka*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing*. Teknik pengumpulan data di peroleh dari studi dokumentasi dengan menggabungkan teknik analisis data menggunakan empat perangkat analisis *framing* Entman, yang pertama adalah pendefinisian masalah (*define problems*): Penolakan pembangunan pabrik semen oleh masyarakat. Kedua adalah memperkirakan sumber masalah (*diagnose causes*): berdirinya pabrik semen dianggap akan merusak lingkungan. Ketiga adalah membuat keputusan moral (*make moral judgment*): pendirian pabrik semen tanpa izin yang belum terbit menyebabkan timbulnya konflik. Terakhir adalah menentukan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*): pembaruan dokumen adedum oleh pemerintah dan memperbarui aspek aspek pemicu konflik. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Harian Suara Merdeka* membingkai konflik menjadi dua, yaitu PT Semen Indonesia merusak lingkungan dan status operasional PT Semen Indonesia belum jelas.

Kata Kunci: harian suara merdeka, framing, konflik, pabrik semen

Abstract

The involvement of the media in reporting an event is not only seen in terms of reality. Truthfully, the media has its own concerns where ideology, political concepts and cultural concepts function in it. This research focused on reporting that discuss the construction of cement factory on Mount Kendeng, Central Java at *Harian Suara Merdeka*. This research used qualitative analysis with the framing analysis method. Technique of collecting data were obtained from documentation studies by combining techniques of data analysis using four framing Entman analysis tools, the first was defining problems (*define problem*): Rejection of the construction of cement factory by the society. The second was estimating the source of the problem (*diagnose causes*): the construction of cement factory was assumed to damage the environment. The third was making a moral decision (*make moral judgment*): the construction of cement victory without permission that hadn't been published yet caused conflict. The last was determining problem solving (*treatment recommendation*): updating addendum documents by the government and updating aspects of conflict triggers. This research showed that *Harian Suara Merdeka* framing conflicts into two, namely *PT Semen Indonesia* damaged the environment and the operational status of *PT Semen Indonesia* was unclear.

Keywords: *harian suara merdeka*, framing, conflict, cement factory

1. PENDAHULUAN

Burton menyatakan, media merupakan salah satu pegangan yang mempunyai nilai lebih di hati masyarakat, walaupun keakurataannya belum dapat dipastikan. Dengan sumber utama berupa opini maupun ide, secara tidak langsung hal itu dapat memperkuat jati diri media tersebut. Tidak hanya itu, konsumsi yang berlebih terhadap media dapat merubah pola pikir dan tindakan seseorang dalam menyelesaikan masalah (Lasinta, 2014). Media juga menyediakan berbagai informasi-informasi penting mengenai dunia politik, lingkungan, sosial dan isu yang sedang merebak (Bratic & Schirch, 2007). Dalam ilmu komunikasi media mempunyai beragam jenis dan manfaat tersendiri bagi masyarakat, terutama media massa. Media massa juga merupakan sebuah wadah diskusi publik mengenai suatu permasalahan yang melibatkan tiga pihak : sumber berita, wartawan dan khalayak (Triyono, 2010). Media massa mempunyai produk berupa berita. Berita merupakan sebuah ulasan mengenai peristiwa yang sedang terjadi, tetapi berita yang telah disusun oleh media adalah bentuk rekonstruksi yang di buat oleh media dengan menyesuaikan kerangka dan mempertimbangkan bagaimana berita itu mempunyai makna lebih bagi pembacanya (Kamaruddin, 2016).

Beberapa analisis mengenai kehidupan sosial, media memiliki posisi dimana keberadaannya merupakan sebuah faktor yang paling menentukan dalam proses perubahan sosial budaya hingga politik. Karl Deutsch (dalam Effendy, 2000:325) juga menjelaskan bahwa media merupakan “urat nadi pemerintah” (*the nerves of government*), dimana mereka yang mempunyai akses penuh kepada informasi (Sobur, 2001). Keterlibatan media sendiri tidak serta merta hanya melihat pada segi realitas saja, tetapi media mempunyai sebuah kepentingan tersendiri dimana ideologi, konsep politik dan konsep budaya dimainkan (Triyono, 2010). Peter Dahlgren (1991:192) juga mengatakan bahwa realitas sosial menurut pandangan konstruktivis merupakan sebuah produk yang di buat manusia dari proses budaya dan penggunaan bahasa (Eriyanto, 2002). Menurut (Setiansah, 2009) sampai saat ini media cukup terlihat memiliki kekuasaan penuh untuk menuntun pembaca dalam memihak, menilai maupun menyatakan apakah berita itu benar atau salah. Tanpa di sadari media massa dapat menggiring kita untuk mengubah definisi realitas sosial maupun asumsi yang kita miliki dengan definisi yang ditanamkan oleh media tersebut (Eriyanto, 2002). Tidak hanya realitas saja, media juga memiliki sisi negative yang juga dapat di sebut dengan stereotip dengan menggambarkan suatu kelompok maupun aktifitas tertentu yang bertujuan untuk menciptakan citra buruk mengenai kelompok maupun aktifitas tersebut (Rasaq, Mohammed, & Ahmad, 2015). Contoh saja pemberitaan mengenai pembangunan pabrik semen di Pegunungan

Kendeng yang berakibat munculnya pro dan kontra di kalangan masyarakat yang akhir-akhir ini menarik perhatian media cetak, online, maupun elektronik. Isu tersebut bermula pada tahun 2009 tentang penolakan rencana pembangunan pabrik semen di sekitar Pegunungan Kendeng oleh PT Semen Gresik. Kemudian, pada tahun 2010 PT Sahabat Mulia Sakti juga merencanakan hal sama, yakni pembangunan pabrik semen di Kecamatan Tambakromo dan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Namun, PT Sahabat Mulia Sakti masih terhalang oleh penyusunan dokumen AMDAL yang berupa izin lingkungan dan dampak lingkungan pada pembangunan pabrik semen (Suharko, 2017).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang berupaya untuk menjelaskan suatu realitas dengan menggunakan deskriptif berbentuk kalimat. Tidak hanya itu metode kualitatif sendiri membantu kita dalam memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif subyek/partisipan (Pujileksono, 2015).

Sumber data pada penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang di peroleh peneliti dari sumber data pertama yang berada di lapangan (Krityantono dalam Fajriyati, 2017). Data primer dalam penelitian ini berupa kumpulan teks berita yang dimuat oleh harian Suara Merdeka yang terkait dengan pemberitaan pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng pada edisi Desember 2016 - April 2017. Pencarian data sekunder dilakukan dengan melibatkan beberapa sumber seperti buku, artikel, jurnal maupun hasil penelitian yang lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode tersebut bertujuan untuk mengetahui suatu hal yang sebelumnya pernah terjadi di masa lampau dan untuk memperkuat data observasi untuk menarik kesimpulan (Djaelani, 2013). Pada metode dokumentasi sebagian data berbentuk surat-surat, catatan harian, foto, laporan dan sebagainya (Rahmat, 2009) . Pengumpulan data yang dilakukan peneliti berupa mengumpulkan teks berita mengenai pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng dari Desember 2016 – April 2017 di Suara Merdeka. Pemilihan waktu ini berdasarkan pemikiran peneliti bahwa pada waktu itu merupakan proses terjadinya suatu konflik hingga resolusi konflik.

Penelitian ini menggunakan analisis teks berita mengenai pembangunan pabrik di Pegunungan Kendeng yang di beritakan oleh Suara Merdeka pada Desember 2016 hingga

April 2017, karena pada bulan tersebut pemberitaan mengenai pembangunan pabrik semen hampir setiap hari diberitakan. Dalam Penelitian ini untuk menganalisis teks, peneliti lebih memfokuskan lagi pada *headline* terbanyak dari lima media cetak lokal. Karena *headline* sendiri merupakan berita yang berada pada halaman utama dengan perkembangan kasus maupun kejadian yang di kemas secara menarik untuk mencuri perhatian masyarakat (Fitriah & El'Arsya, 2011). Dengan demikian, ada 13 berita yang dimuat oleh Suara merdeka yang akan menjadi fokus analisis pada penelitian ini :

Tabel 1. Berita Harian Suara Merdeka

No.	Judul	Tanggal
1.	Gubernur Cabut Izin Semen Rembang	17 Januari 2017
2.	Sikap PT Semen Indonesia di tunggu	18 Januari 2017
3.	Ketua DPRD Sayangkan Penghentian Pabrik Semen	18 Januari 2017
4.	Perbaikan Dokumen AMDAL di kebut	19 Januari 2017
5.	3.000 Pekerja Segera Di Rumahkan	20 Januari 2017
6.	PT Semen Indonesia Ajukan Izin Lagi	24 Januari 2017
7.	Gubernur Teken Izin Semen Rembang	25 Februari 2017
8.	Pabrik Semen Segera Uji Coba	28 Februari 2017
9.	Semen Rembang Beroperasi April	18 Maret 2017
11.	Pemerintah Perlu Hati-Hati	20 Maret 2017
12.	Peresmian Pabrik Di Minta Tunggu Kajian Lingkungan	21 Maret 2017
13.	Peresmian Pabrik Semen Rembang Di Tunda	25 Maret 2017

Sumber : (Suara Merdeka, 2017)

Pada penelitian ini analisis data dilakukan dengan menguraikan dan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan, kemudian data tersebut disesuaikan dengan menggunakan kerangka analisis model Robert N Entman. Entman menjelaskan bahwa *framing* pada dasarnya mengarah pada pemberian definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap sebuah peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2005, 185-201),

Framing juga dapat di lihat sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang mempunyai ciri khas sehingga isu-isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar dari

pada isu yang lain. Entman melihat *framing* dalam dua dimensi besar, yaitu : seleksi isu dan penekanan atau penonjolan pada aspek-aspek tertentu dari realitas/isu.

Tabel 2. Dimensi *Framing* Entman

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam dalam sebuah berita, dan aspek mana yang akan diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung didalamnya bagian berita yang dimasukkan (<i>included</i>) dan dikeluarkan (<i>excluded</i>). Tidak semua aspek atau bagian dari isu maupun masalah ditampilkan, wartawan hanya memilih beberapa aspek tertentu.
Penonjolan aspek tertentu dari isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari suatu peristiwa/isu tersebut dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak.

Tabel 3. Perangkat *Framing* Entman

<i>Define problems</i>	Bagaimana sebuah peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa ?
<i>Diagnose causes</i>	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa (aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah ?
<i>Make Moral Judgement</i>	Nilai moral apa yang disajikan untuk menggambarkan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk meligitimasi atau mendeligitimasi suatu tindakan ?
<i>Treatment recommendation</i>	Penyelesaian seperti apa yang ditawarkan untuk mengatasi sebuah masalah/isu?

Elemen pertama, *define problems*, menekankan bagaimana sebuah peristiwa dipahami oleh wartawan. Peristiwa yang sama mungkin dipahami dengan berbeda, dan bingkai yang berbeda akan menyebabkan realitas yang dibentuk berbeda pula. Elemen berikutnya adalah, *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah). Elemen ini digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap pelaku dari suatu peristiwa atau masalah. Penyebab di sini, bisa berarti seseorang atau sesuatu.

Ketiga adalah *make moral judgement* (membuat pilihan moral), yaitu elemen yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Kempat, *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan sebuah peristiwa atau masalah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Rekonstruksi Realitas Konflik Perusahaan

Media merupakan sebuah kelompok tertentu yang dapat menentukan ideologi yang mendominasi dan berakhir pada kekuasaan terhadap golongan tertentu untuk membuat suatu opini dan persepsi di kalangan masyarakat, tanpa ada pemaksaan maupun kekerasan (Mahdi, 2015). Seperti halnya Suara Merdeka yang mempunyai ideologi maupun persepsi tersendiri atas terjadinya peristiwa tertentu salah satunya pada konflik pembangunan pabrik semen di Gunung Kendeng. Dalam hal ini Suara Merdeka bebas menentukan judul dan isi berita untuk menggambarkan realitas konflik yang sedang terjadi.

Dalam penelitian ini perangkat *framing* Etman akan membantu memahami bagaimana pembingkai berita Suara Merdeka mengenai konflik pembangunan pabrik semen di Gunung Kendeng pada Desember 2016 – April 2017. Dalam melakukan analisis teks peneliti memiliki pandangan berdasarkan 4 elemen, yaitu mendefinisikan masalah (*define problems*), memperkirakan sumber masalah (*diagnose causes*), membuat keputusan moral (*make moral judgement*), dan menentukan penyelesaian masalah (*treatment recommendation*). Berikut ini merupakan pembingkai Suara Merdeka mengenai kasus pembangunan pabrik semen di Gunung Kendeng :

Tabel 4. PT Semen Indonesia Merusak Lingkungan

<i>Define problems</i>	Pembangunan pabrik Semen Indonesia di kawasan kendeng membuat masyarakat was-was dengan maraknya isu mengenai kerusakan lingkungan.
<i>Diagnose causes</i>	Aksi penolakan yang dilakukan masyarakat terus muncul, mereka menuntut keadilan kepada pemerintah untuk menghentikan kegiatan pabrik semen tersebut.

<i>Make moral judgement</i>	Pembangun pabrik semen tersebut memicu perseteruan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan.
<i>Treatment recommendation</i>	Pemerintah mengambil jalan tengah dengan meminta pembaruan izin dengan memperhatikan dokumen adedum mengenai dampak lingkungan dan pengelolaan lingkungan.

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2018

3.2 Define Problems

Pada pemberitaan ini Suara Merdeka menginterpretasikan permasalahan yang terajadi merupakan sebuah konflik yang dipicu karena pembangunan pabrik semen yang menimbulkan isu kerusakan lingkungan. Hal ini di perjelas dengan pernyataan sekertaris PT Semen Indonesia Agung Waharto.

“Keputusan yang di keluarkan oleh MA ada konsekuensi dan aturan mainnya, izin kingkungan itu ada dua, lingkungan penambangan dan pendirian pabrik. Putusan MA itu tentang izin lingkungan penambangan”.....(Suara Merdeka, 6 Desember 2016)

Suara merdeka mengamabil pernyataan dari sekertaris PT Semen Indonesia karena melihat bahwa peristiwa yang sedang terjadi dikarenakan adanya isu mengenai kerusakan lingkungan. Dapat dijelaskan pada kutipan di atas bahwa pembangunan pabrik semen tersebut memiliki konsekuensi. Lebih lanjutnya lagi dalam kutipan tersebut kata “konsekuensi” yang berarti akibat, secara tidak langsung Suara Merdeka ingin menyampaikan bahwa adanya pembangunan pabrik semen ini akan berakibat pada lingkungan sekitar penambangan.

Mengenai pro-kontra pembangun pabrik semen tersebut Suara Merdeka juga menampilkan pendapat dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda (GP).

“ Pemerintah jangan hanya mengejar angka statistik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita saja karena kita ingin industri di Indonesia menjadi berkelanjutan, ramah lingkungan dan bermanfaat kepada masyarakat sekitar” ungkapny. (Suara Merdeka, 10 Januari 2016)

Teks di atas menyimpulkan bahwa Suara Merdeka ingin memberitahu pemerintah bukan hanya mementingkan masalah ekonomi saja tetapi ada lingkungan sekitar yang harus

diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Adanya aksi protes yang berkempanjangan membuat pemerintah memikirkan ulang mengenai izin lingkungan jika pabrik tersebut ingin beroperasi. Seperti pemberitaan pada Suara Merdeka dengan judul “Tuntu Keadilan, Jalan Kaki Rembang-Semarang” yang memperjelas bahwa pembangun semen ini akan menimbulkan konflik berkepanjangan dari pemerintah maupun PT Semen Indonesia tidak mengambil tindakan lebih lanjut.

Pada bagian yang lainnya Suara Merdeka juga menampilkan sikap pemerintah dalam menghadapi protes yang dilakukan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada berita tanggal 17 Januari 2017 dengan judul berita “Gubernur Cabut Izin Semen Rembang”. Berita tersebut didukung lead berupa :

Gubernur Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Rembang. Dengan pencabutan ini, semua kegiatan PT Semen Indonesia baik berupa konstruksi maupun produksi tidak diperbolehkan berjalan lagi (Suara Merdeka, 17 Januari 2018).

Dari kutipan diatas, Suara Merdeka ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa keresahan yang selama ini mereka rasakan telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Suara Merdeka mendukung penuh penolakan masyarakat mengenai pembangunan pabrik semen tersebut dengan penegasan pada berita mengenai keputusan pemerintah bahwa pabrik semen tidak boleh beroperasi kembali.

3.3 Diagnose Causes

Suara Merdeka menyimpulkan bahwa pendirian pabrik semen tersebut merupakan sebuah kesalahan yang perlu dikaji lebih dalam lagi mengenai dampak dan akibatnya. Masyarakat yang kontra akan pembangunan ini selalu melakukan aksi protes mulai dari berjalan dari rembang menuju semarang, melakukan blockade jalan menuju pabrik dan aksi-aksi protes lainnya. Mereka melakukan hal tersebut untuk menuntut keadilan atas keputusan Mahkamah Agung mengenai gugatan pendirian pabrik semen. Hal tersebut diperjelas Suara Merdeka pada berita dengan judul “Tak Ada Klausul Penghentian Pabrik Semen” yang secara tidak langsung Suara Merdeka ikut serta menyuarakan keluhan-kesah masyarakat. menanggapi hal tersebut Gubernur Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa pemerintah sedang membahas kajian lingkungan hidup strategis atas kawasan pegunungan Kendeng (Suara Merdeka, 16 Desember 2016). Hal ini sebagaimana yang telah ditulis pada teks berita :

Menurut Ganjar, saat ini tim yang terdiri atas staf Presiden, Kementrian Lingkungan Hidup, BUMN, ESDM, dan Pemprof Jateng, sedang membahas kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) atas kawasan pegunungan kendeng. “Saya punya waktu 60 hari, sampai 17 Januari 2017. Hasilnya, apakah ada revisi izin lingkungan atau bagaimana, tunggu saja” katanya. (Suara Merdeka, 16 Desember 2016).

Pada pemberitaan lainnya Suara Merdeka juga menyatakan bahwa PT Semen Indonesia belum memberi keterangan resmi mengenai pencabutan izin lingkungan yang membuat pendemo nyaris ricuh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Seperti yang telah ditulis pada teks berita :

“Kemarin memang proses kajian proses kajian (izin kedua). Tapi begitu Pak Gubernur mengeluarkan keputusan (No 6601/4 Tahun 2017) maka kajian di-*stop* dulu. Harus memperbarui lagi, karena ada keputusan Gubernur. Kini Sifatnya kami pasif dan menunggu,” kata anggota Komisi Penilai Amdal Dwi P Sasongko, Selasa (17/1) malam. (Suara Merdeka, 18 Januari 2017)

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa dari pihak pemerintah bersifat pasif dan semua keputusan ada pada PT Semen Indonesia yang diharapkan segera menyempurnakan dokumen mengenai izin lingkungan sesuai pada keputusan Mahkamah Agung.

3.4 Make Moral Judgement

Pesan moral yang disampaikan Suara Merdeka menimbulkan perseteruan yang terjadi diantara masyarakat, pemerintah dan perusahaan. Polemik ini berawal dari saling gugat di pengadilan mengenai izin lingkungan pada tahun 2015-2016 hingga pengajuan izin kembali pada akhir November 2016 dengan berbagai perbaikan hingga menimbulkan pro kontra dikalangan masyarakat. Masyarakat yang kontra selalu melakukan aksi demo untuk menentang berdirinya pabrik semen tersebut yang ditakutkan akan berdampak pada lingkungan sekitar pabrik jika aktivitas terus dilakukan, sedangkan masyarakat yang kontra selalu mendukung setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun perusahaan dengan alasan lapangan pekerjaan atau kesejahteraan penduduk. Hal ini di kuatkan dengan pendapat dari Pusat Studi Kebijakan Publik yaitu Sofyano Zakaria pada teks berita sebagai berikut:

Pembangunan pabrik semen di sana menghasilkan uang, namun tidak akan bermanfaat jika pada akhirnya akan membuat sengsara manusia, segala makhluk, serta alam sekitar. Karena itu, dia meminta pejabat pemerintah terkait proyek, tidak merekayasa pemenuhan persyaratan kajian lingkungan. Kajian harus diawasi ketat oleh semua

pihak dan pihak pemerintah jangan alergi terhadap suara masyarakat atas hal tersebut.
(Suara Merdeka 20 Maret 2017)

Pesan moral juga di sampaikan oleh Anggota D DPRD Jateng, Muhammad Ngainirrichadl yang meminta bahwa peresmian pabrik semen harus menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang di perkirakan akan selesai pada April.

Alangkah baiknya peresmian dilakukan setelah itu. Tujuannya untuk memberikan kepastian jika pabrik pelat merah tersebut telah sesuai dengan kajian lingkungan hidup. “Jangan gegabah meresmikan, alangkah baiknya menunggu KLHS,” (Suara Merdeka, 21 Maret 2017)

Pesan moral lainnya disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang meminta semua pihak menghormati segala keputusan dan menunggu hasil dari KLHS, selain itu Ganjar juga prihatin atas meninggalnya salah satu warga penolak keberadaan pabrik semen saat melakukan aksi protes dengan mengecor kaki di halaman Istana Merdeka.

Ganjar meminta semua pihak menghormati dan menunggu hasil KLHS. Ganjar juga menyampaikan rasa prihatin atas meninggalnya salah satu warga penolak keberadaan pabrik semen yang mengecor kaki dengan semen saat berunjuk rasa di Jakarta. Harapannya, tak ada lagi protes yang dilakukan dengan cara menyakiti tubuh sendiri.

Selain dari teks berita, pesan moral juga disampaikan oleh Suara Merdeka melalui judul berita yang terbit pada tanggal 10 Januari 2017 yaitu “Gus Tutut: Rini Perlu Dialog Dengan Warga Rembang”. Suara Merdeka menjadikan Gus Tutut sebagai narasumber yang menguatkan pesan moral terhadap pro kontra yang terjadi akibat pembangunan pabrik semen ini. Dalam dialongnya Gus Tutut yakin bahwa masyarakat akan mendukung pendirian pabrik semen ini jika pemerintah mampu mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan tersebut dengan baik.

Moral Judgement yang ditampilkan Suara Merdeka cenderung mengarah pada ketidak yakinan masyarakat atas pembangunan pabrik semen yang dikhawatirkan akan merusak lingkungan dan pada akhirnya mereka melakukan aksi protes kepada pihak-pihak terkait. Suara Merdeka juga menjelaskan bahwa adanya pro kontra yang terjadi di masyarakat diawali dengan adanya rencana pendirian pabrik yang di kuatkan dengan isu-isu bahwa pendirian pabrik tersebut akan memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan sekitar.

3.5 Treatment Recommendation

Penyelesaian masalah mengenai pro kontra yang terjadi akibat pembangunan pabrik semen tersebut, Suara Merdeka menuliskan jika PT Semen Indonesia ingin melanjutkan aktifitasnya wajib mengajukan izin lingkungan kembali dengan menaati keputusan dari Mahkamah Agung. Seperti pada teks berita:

Jika tetap ingin melanjutkan proses konstruksi dan produksi, PT Semen Indonesia wajib mengajukan izin lingkungan lagi dengan menaati putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016. (Suara Merdeka, 17 Januari 2017)

Dari teks berita di atas dapat dijelaskan bahwa aktifitas PT Semen Indonesia tidak dapat berjalan lagi jika mereka tidak menaati keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mengenai peninjauan kembali perihal izin lingkungan. Dalam pemberitaan lainnya Suara Merdeka merekomendasikan bahwa persoalan ini akan menemui titik tengah jika PT Semen Indonesia segera menyempurnakan dokumen Amdal dan RKL-RPL. Seperti pada teks berita berikut:

Gubernur memerintahkan kepada PT Semen Indonesia untuk menyempurnakan dokumen Amdal dan RKL-RPL sesuai dengan putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016 seperti yang di berikan kemarin, ada empat hal yang harus di sempurnakan. Pertama, memperbaiki tata cara penambangan. Kedua, menjaga keberlangsungan sistem akuifer (tampungan air bawah tanah). Ketiga, memberikan solusi konkret untuk kebutuhan air bersih warga. Keempat, memberikan solusi konkret untuk kebutuhan air pertanian. (Suara Merdeka, 18 Januari 2017)

Dari kutipan teks di atas, Suara Merdeka memaparkan langkah-langkah yang harus di ambil dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan penyempurnaan dokumen Amdal dan RKL-RPL yang di putuskan oleh Mahkamah Agung dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai empat hal yang menjadi permasalahan ini. Selain itu, Anggota Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso juga menyampaikan pendapatnya bahwa pencabutan izin lingkungan merupakan langkah yang harus di taati dan di cari solusi permasalahannya. Seperti pada teks berikut:

Wakil ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso menilai langkah pencabutan izin lingkungan kegiatan penambangan merupakan langkah kepatuhan terhadap hukum dan keputusan MA yang harus di hormati. Untuk itu, menurutnya perlu dilakukan tindakan

lanjut guna melaksanakan putusan MA. Dalam hal penyusunan amdal yang baru masing-masing pihak diharapkan bisa mendapatkan titik temu. “Permasalahan yang mengemuka adanya perbedaan persepsi tentang beberapa hal yang dianggap krusial. Langkah teknisnya dalam penyusunan amdal baru duduk bersama antar pihak yang terlibat sengketa dan dalam hal ini Komisi Amdal harus aktif mengambil peran. (Suara Merdeka, 17 Januari 2017)

Berdasarkan kutipan di atas, Suara Merdeka merekomendasikan dari pendapat Wakil Ketua D DPRD Jateng Hadi Santoso bahwa perihal izin lingkungan memang harus di patuhi dan dalam penyusunan amdal baru dari masing-masing pihak harus ikut andil agar mendapat jalan keluar terbaik untuk masalah ini. Suara Merdeka juga merekomendasikan dalam judul beritanya yang terbit pada tanggal 23 Februari 2017 “Semua Pihak Diminta Taati Hasil Kajian Lingkungan”.

Tabel 5. Status Operasional PT Semen Indonesia Belum Jelas

<i>Define problems</i>	Konflik antara masyarakat, pemerintah serta perusahaan semakin rumit dengan adanya ketentuan hukum yang belum pasti.
<i>Diagnose causes</i>	Adanya pencabutan dan pembaharuan izin lingkungan oleh ubernur dengan pengubahan beberapa poin yang dianggap pemicu konflik.
<i>Make moral judgement</i>	Penetapan izin lingkungan yang belum pasti membuat masyarakat semakin ragu
<i>Treatment recommendation</i>	Perombakan izin lingkungan dengan memperbaiki aspek-aspek tertentu yang selama ini dianggap sebagai pemicu permasalahan atau konflik.

Sumber : Olahan Data Peneliti, 2018

3.6 Define Problem

Ketentuan hukum yang belum pasti membuat konflik yang terjadi semakin memanas. Aksi demo yang berkepanjangan pun hingga saat ini masih dilakukan , guna memperoleh kepastian dan hak mereka sebagai warga Kendeng. Pencabutan izin dan pembaruan izin yang di lakukan pemerintah tidak membuat mereka jera dan tetap pada pendirian awal. Tuntutan yang mereka ajukan semua mengarah kepada dampak negatif yang nantinya akan diperoleh jika pabrik semen itu tetap di lanjutkan, tanpa pengkajian lebih lanjut. Pengabulan gugatan terkait izin lingkungan PT Semen Indonesia membuat masyarakat melakukan aksi demo yang bertujuan

untuk meminta Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menindaklanjuti putusan yang di keluarkan oleh MA. Seperti pada teks berita:

Tujuan aksi ini adalah untuk mengetuk hati Gubernur Ganjar Pranowo. Bagi mereka, lanjut dia tidak ada tindakan apapun dari Ganjar Pranowo terkait di kabulkannya gugatan warga atas izin lingkungan oleh MA. Sampai saat ini proses pembangunan pabrik masih berjalan. (Suara Merdeka, 6 Desember 2016)

Dari teks di atas menunjukkan bahwa masyarakat resah atas pendirian pabrik semen dengan berbagai dampak yang di peroleh maupun perihal izin lingkungan jika pembangunana pabrik semen tetap dilanjutkan. Selain itu masyarakat juga meminta Gubernur menindaklanjuti mengenai gugatan yang telah di kabulkan oleh MA terkait izin lingkungan PT Semen Indonesia. Lebih lanjut lagi, akhirnya Ganjar Pranowo menindaklanjuti aksi masyarakat dengan melakukan pencabutan izin lingkungan. Hal ini terlihat pada *lead* berita harian Suara Merdeka tanggal 17 Januari 2017 “SEMARANG – Gubernur Ganjar Pranowo mencabut izin lingkungan PT Semen Indoensia (Persero) Tbk di Rembang. Dengan pencabutan ini, semua kegiatan PT Semen Indonesia baik berupa konstruksi maupun produksi tidak di perbolehkan berjalan lagi”.

Suara Merdeka juga menilai bahwa pro kontra yang sedang terjadi ini karena keluarnya izin lingkungan baru penambangan dan operasional pabrik, seperti pada teks:

Kerumitan di sekitar perizinan tergambar dengan jelas. Tentu saja hal ini menjadi preseden buruk bagi penciptaan iklim investasi, khususnya di Jawa Tengah. Tetaapi apa boleh buat, masalahnya memang rumit dan perlu di urai satu per satu dengan penuh kesabaran. Namun kita harapkan semua bisa diselesaikan tanpa ada ketentuan hukum yang dilanggar. (Suara Merdeka, 27 Februaari 2017)

Dari teks di atas dapat di jelaskan bahwa pro kontra yang terjadi di karenakan adanya kerumitan izin yang di keluarkan mengenai pembangunan pabrik semen ini. Dari kerumitan yang terjadi ini diharapkan semua pihak tidak ada yang melanggar ketentuan hukum nantinya.

3.7 Diagnose Causes

Pencabutan izin yang di lakukan oleh Gubernur Ganjar Pranowo didasari oleh keresahan warga sekitar pabrik, mereka menyampaikan aspirasi dengan berbagai cara agar didengar dan di tindaklanjuti oleh Gubernur. Polemik ini berawal dari aksi saling gugat di pengadilan mengenai izin lingkungan pada tahun 2015-2016 yang menghasilkan keputusan MA Nomor 99 PK/TUN/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang memerintahkan Gubernur untuk mencabut

izin lingkungan Nomor 660. Dan pada saat itu, akhirnya Gubernur menaati perintah MA untuk mencabut izin lingkungan dengan penghentian kegiatan PT Semen Indonesia di Rembang. Jika PT Semen Indonesia ingin tetap melanjutkan kegiatannya, mereka harus mengajukan izin lingkungan lagi dengan menaati putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN/2016 dengan tiga poin utama, seperti pada teks:

Ada tiga poin utama dalam keputusan tersebut. “Menyatakan batal dan tidak berlaku, keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomer 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tanggal 9 November 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku Semen dan Pembangunan Serta Pengoprasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah,” Poin kedua, Gubernur memerintahkan PT Semen Indonesia menyempurnakan dokumen adedum analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal dan RKL-RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan/ Rencana Pemantauan Lingkungan). Poin ketiga, dengan berlakunya keputusan Gubernur itu, maka izin usaha dan kegiatan yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 sebagaimana diubah oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016, dibatalkan. Usaha dan atau kegiatan ditunda sampai penerbitan putusan Gubernur tentang penambangan yang telah disesuaikan dengan amar putusan PK MA Nomor 99 PK/TUN/2016. “Semua bentuk kegiatan (konstruksi maupun produksi) dihentikan, sampai ada izin baru yang sesuai dengan putusan PK MA Nomor 99 PK/TUN/2016,” kata Ganjar. (Suara Merdeka, 17 Januari 2017)

Dalam teks di atas, Suara Merdeka menyebutkan jika ingin kegiatan berjalan kembali pihak PT Semen Indoensia harus mengajukan izin kembali dan menaati putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung. Hingga munculnya putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, PT Semen Indonesia belum memberi keputusan apakah akan mengajukan izin kembali atau tidak. Seperti pada *lead* berita harian Suara Merdeka tanggal 18 Januari 2017 “SEMARANG- Sikap PT Semen Indonesia (SI) menyusul keluarnya Surat Keputusan Gubernur No 6601/4 Tahun 2017 tertanggal 16 Januari 2017 tentaang Pencabutan Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bahan Baku dan Penambangan serta Pengoperasian Pabrik Semen PT Semen Indonesia ditunggu”. Pada pemberitaan lainnya, Suara Merdeka juga

menurunkan berita mengenai perbaikan dokumen amdal yang harus di kebut dan diperbaiki secepat mungkin, seperti pada teks:

Terkait perbaikan dokumen Amdal, pengajar Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Hukum Undip Dr Lita Tyesta Addy Listya Wardhani menyatakan PT Semen Indonesia masih memiliki peluang mengajukan izin lingkungan yang baru. Namun pengajuannya harus dengan mengikuti aturan baku dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh negara. Perusahaan juga masih bisa memperbaiki kekurangan mengenai syarat Amdal, misalnya teknis operasional produksi, penguatan teknologi, dan memperkecil dampak lingkungan. (Suara Merdeka, 19 Januari 2017)

Selain itu, Suara Merdeka juga ingin menjelaskan bahwa PT Semen Indonesia telah mengajukan izin kembali dengan memperbarui empat aspek yang tertera pada putusan peninjauan kembali MA Nomor 99 PK/TUN/2016 sebagaimana yang di jelaskan oleh Kepala Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Sugeng Riyanto. Ada empat hal yang harus disempurnakan kembali untuk mencapai kesepakatan bersama dalam sidang yang akan dilakukan oleh Komisi Penilaian Amdal. Berita tersebut sebagaimana disampaikan pada teks :

Ada empat hal yang harus disempurnakan, pertama, memperbaiki tata cara penambangan. Kedua, menjaga keberlangsungan sistem akuifer atau tampungan bawah tanah. Ketiga, memberikan solusi konkret untuk kebutuhan air bersih warga. Keempat, memberikan solusi konkret untuk kebutuhan air pertanian. Atas pengajuan izin tersebut, Komisi Penilaian Amdal akan melakukan sidang terbuka di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) pada Kamis, 2 Februari. Kepala Dinas LHK, Sugeng Riyanto menjelaskan, PT Semen Indonesia telah melayangkan permohonan pada tanggal 17 Januari. Namun penyempurnaan dokumen amdal dan RKL-RPL baru diserahkan sehari setelahnya. Penyempurnaan dokumen ini menjadi poin utama. Sebagaimana putusan peninjauan kembali MA Nomor 99 PK/TUN/2016, tanggal 5 Oktober 2016. (Suara Merdeka, 24 Januari 2017)

Dalam teks di atas, terlihat jelas bahwa Suara Merdeka ini menampilkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan yang menjadi alasan utama pencabutan izin operasional pabrik semen terkait permasalahan lingkungan jika tidak ada peninjauan ulang dokumen Amdal.

3.8 Make Moral Judgement

Sisi moral yang di tampilkan Suara Merdeka lebih mengarah kepada masyarakat yang menolak keberadaan pabrik semen tersebut. Pencabutan izin lingkungan yang di setuju oleh Gubernur

tidak membuat hati mereka tergugah sebelum ada surat keputusan secara resmi. Seperti pada teks berikut:

Salah seorang pemimpin kelompok penolak pabrik semen, Joko Priyanto, mengaku sudah mendengar kabar soal pencabutan izin PT Semen Indonesia di Rembang oleh Gubernur. Namun, pihaknya belum sepenuhnya yakin sebelum Ganjar menerbitkan SK itu. “Dengar kabar itu, ya senang. Tapi, saudara-saudara penolak tidak mudah percaya sebelum menerima SK resmi pencabutan tersebut,” ujar Joko, di Rembang, semalam. (Suara Merdeka, 17 Januari 2017)

Teks di atas menunjukkan bahwa Suara Merdeka menunjukkan keraguan masyarakat terkait keputusan Gubernur mengenai pencabutan izin PT Semen Indonesia jika SK belum resmi diterbitkan. Selain itu, Suara Merdeka juga menguatkan lagi dengan judul berita yang terbit pada tanggal 25 Maret 2017 yakni “Semen Indonesia Wajib Jawab Keraguan Warga”.

4. PENUTUP

Pemberitaan mengenai konflik yang terjadi atas pembangunan pabrik semen tersebut memiliki nilai berita tinggi, di samping itu banyaknya pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait adanya kepentingan lainnya. Suara Merdeka berupaya menampilkan sebuah realitas yang terjadi dalam bentuk realitas media yang berupa teks berita. Pada dasarnya munculnya konflik sosial mengharuskan media menjadi suatu pilar dimana intensitas maupun ruang lingkup sangat dibatasi, karena ideologi yang ada akan membentuk keinginan, nilai-nilai, dan harapan menurut sistem yang telah ditentukan. Tak ayal jika media merupakan “tangan-tangan” kelompok tertentu untuk membentuk suatu ideologi yang mendominasi (Mahdi, 2015). Pada penulisan berita Suara Merdeka juga menyelipkan beberapa pesan moral tentang hikmah apa yang bisa kita petik di balik sebuah kejadian. Tidak hanya itu, Suara Merdeka juga memberikan pemecahan-pemecahan masalah yang sekiranya bisa meredakan konflik yang sedang terjadi. Penelitian ini juga berupaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa konflik yang sedang terjadi pasti ada solusi dan jalan tengahnya. Berdasarkan analisis peneliti dapat ditarik kesimpulan jika adanya konflik mengenai pembangunan pabrik semen ini dikarenakan beredarnya isu kerusakan lingkungan dan status operasional dari PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng ini belum jelas.

PERSANTUNAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Triyono M.Si selaku Dosen Pembimbing

yang begitu luar biasa sabar dalam membimbing saya sampai pada tahap ini. Tak lupa ucapan terima kasih untuk keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberika doa dan dukungan untuk menyelesaikan tugas ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Akpan, F. U., Ering, S. O., & Adeoye, A. O. (2013). The Media And Conflicts In Nigeria. *International Journal of Asian Social Science*, 3(11), 2279–2287.
- Bartholomé, G., Lecheler, S., & de Vreese, C. (2015). Manufacturing Conflict? How Journalists Intervene in the Conflict Frame Building Process. *International Journal of Press/Politics*, 20(4), 438–457. <https://doi.org/10.1177/1940161215595514>
- Basri, & Nurhamlin. (2014). Konflik Masyarakat dan Perusahaan Perkebunan Serta Alternatif Penyelesaiannya di Kabupaten Rokan Hulu. Retrieved from <https://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/5741>
- Bratic, V., & Schirch, L. (2007). Why and When to Use the Media for Conflict Prevention and Peacebuilding, (Paper 6), 9.
- Djaelani, A. R. (2013). Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Majalah Ilmiah Pawiyatan*, XX(1), 82–92. <https://doi.org/10.1177/1056492601104012>
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing. Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (I). Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Fajriyati, T. (2017). MEDIA DAN KONFLIK KEAGAMAAN (Analisis Framing Pemberitaan Pembakaran Rumah Ibadah di Tanjungbalai pada Harian Sinar Indonesia Baru).
- Fitriah, M., & El'Arsya, F. (2011). Berita Utama Surat Kabar Lokal di Bogor Studi Analisis Isi pada Jurnal Bogor dan Radar Bogor. *Komunikasi Pembangunan*, 9(1), 11–19.
- Januarti, R., Mulkan, D., & Agustin, H. (2012). Konstruksi Realitas Pemberitaan Brankas Nazaruddin Dalam Laporan Utama Majalah Tempo. *Peran Website Bapusipda.Jabarprov.Go.Id Sebagai Media Promosi Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat*, 1(1), 1–10.
- Kamaruddin. (2016). Kontruksi Realitas Dalam Media Massa. *Jurnalisme*, 1(1). <https://doi.org/10.1002/ajim.20908>
- Khotmil, A., & Umar, T. M. (2015). Bingkai Jurnalisme Profetik pada Headline Berita di Harian Umum Republika dan Kompas. *Jurnalistik*.
- Kresna, M. (2017). Serbuan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng Utara. Retrieved September 14, 2017, from <https://tirto.id/serbuan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng-utara-clgT>
- Krismawan, R. N. (2012). Perancangan Iklan Komersial Harian Suara Merdeka Sebagai Pendukung Untuk Memenangkan Persaingan Dengan Koran Yang Sejenis Di Jawa

Tengah.

- Lasinta, M. (2014). KONSTRUKSI MEDIA ONLINE DALAM SENGKETA VERIVIKASI PARTAI POLITIK (Analisis Framing Tempo.co dan Viva.co.id Pada Pemberitaan Partai Bulan Bintang Edisi 1 Januari-31 Maret 2013). <https://doi.org/10.1192/bjp.205.1.76a>
- Lutfillah, K. (2011). KASUS NEWMONT (Pencemaran Teluk Buyat). *Kybernan*, 2(1).
- Mahdi, A. (2015). BERITA SEBAGAI REPRESENTASI IDEOLOGI MEDIA (Sebuah Telaah Kritis) Acan Mahdi. *Al-Hikmah*, 9.
- Muslich, M. (2008). Kekuasaan media massa mengonstruksi realitas. *Media*, 2, 150–159.
- Nurmaeda, A., Purwoko, & Setiyono, B. (2013). Konflik Corporate vs. Society (Analisis Terhadap Konflik dalam Kasus Pendirian Pabrik Semen). *Journal of Politic and Government Studies*, 321–330.
- Oktaviana, G. (2015). *Analisis Konflik Sumberdaya Alam Di Pegunungan Kendeng Utara, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus : Rencana Pembangunan pabrik semen oleh PT.SMS di Kecamatan Tambakromo dan Kayen)*. Intitut Pertanian Bogor.
- Paul, V., Singh, P., & John, S. B. (2013). Role of mass media in social awreness 1 1. *Internasional Journal of Humanities & Social Sciences*, 1(August), 34–38.
- Pujileksono, S. (2015). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Putra, R. D., Unde, A. A., & Hasrullah. (2013). HEADLINE POLITIK DAN POLITIK HEADLINE DALAM HARIAN FAJAR DAN TRIBUN TIMUR : KEBIJAKAN EDITORIAL SURAT KABAR DI MAKASSAR. *Komunikasi KAREBA*, 2(4), 327–334.
- Rahmat, P. S. (2009). PENELITIAN KUALITATIF. *EQUILIBRIUM*, 5(9), 1–8.
- Rasaq, A., Mohammed, R. Bin, & Ahmad, M. K. (2015). News Framing and Ethnic Conflicts Vulnerability in Multiethnic Societies. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 6(6), 496–505. <https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n6s1p496>
- Santosa, B. A. (2017). PERAN MEDIA MASSA DALAM MENCEGAH KONFLIK. *ASPIKOM*, 3(2), 199–214.
- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media* (I). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suharko, S. (2017). Masyarakat Adat versus Korporasi: Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen di Kabupaten Pati Jawa Tengah Periode 2013-2016. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 20(2), 97. <https://doi.org/10.22146/jsp.24776>
- Sumartono. (2004). Konflik Dalam Pemberitaan Media Massa. *Jurnal Komunikologi*, 1(1), 13–19. Retrieved from http://fikom.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/2305/2014/03/KONFLIK-DALAM-PEMBERITAAN-MEDIA-MASSA_Sumartono.pdf
- Suryadi, I. (2011). Peran Media Massa Dalam Membentuk Realitas Sosial. *ACADEMICA*

Fisip Untad, III(3), 634–646.

Triyono, A. (2010). Citra Partai Politik Dalam Framing Media. *Komuniti2, I(1)*.

Wacana, P., Rodhialfalah, A., Widjanarko, S., Chandra, F., Ahmad, F., Fauzi, I., & Lukiarti, M. (2014). KAJIAN POTENSI KAWASAN KARST KENDENG UTARA PEGUNUNGAN REMBANG MADURA KABUPATEN REMBANG , Abstrak Latar Belakang Fisiografi dan Morfologi Geologi, 30–31.

Wirawan. (2011). *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika.